

**BAB IV**  
**PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN**  
**DAN**  
**ASAS KESEIMBANGAN**

**A. PENGANTAR**

Setelah dituliskan di dalam Bab II tentang Perlindungan Pasien yang pada intinya merupakan bagian substansial yang terdapat di dalam suatu norma atau kaidah dari sistem perundang-undangan. Dengan memahami unsur-unsur yang terdapat di dalam suatu sistem perundang-undangan, maka akan terlihat aktivitas apa saja yang diperkenankan, dilarang, atau dianjurkan dalam rangka mempertahankan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak berkepentingan dengan berpijak pada hukum positif.

Di dalam Bab II secara garis besar terdiri atas dua unsur utama, yaitu unsur Hukum Kesehatan dan unsur Hukum Perlindungan Pasien. Di dalam unsur Hukum Kesehatan akan terakumulasi didalamnya pemahaman-pemahaman atas Pengertian Kesehatan, Asas dan Tujuan Kesehatan, Hak dan Kewajiban, dan Tanggung Jawab Pemerintah.

Kemudian di dalam pembahasan dari Hukum Perlindungan Pasien terakumulasi didalamnya pemahaman-pemahaman atas Pengertian Pasien, Hak dan Kewajiban Pasien, Hak dan Kewajiban Dokter, Hak dan Kewajiban Rumah Sakit, Perlindungan Pasien Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Perlindungan Pasien Menurut Permenkes Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.

Sedangkan pembahasan di dalam Bab III pada intinya merupakan bagian substansial yang terdapat di dalam suatu asas atau nilai, yang mengacu pada pandangan moral atau etika yang diikhtiarkan dapat menjadi landasan berpijak keberadaan sistem perundang-undangan. Dengan memahami unsur-unsur yang terdapat di dalam suatu asas, maka akan terlihat aktivitas apa saja yang diperkenankan, dilarang, atau dianjurkan dalam rangka mempertahankan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak berkepentingan dengan berpijak pada suara hati atau nurani yang jernih.

Di dalam Bab III secara garis besar terdiri atas dua unsur utama, yaitu unsur Asas dan Asas Hukum dan unsur Asas Keseimbangan. Di dalam unsur Asas dan Asas Hukum akan terakumulasi didalamnya pemahaman-pemahaman atas Pengertian Asas, Pengertian Asas Hukum, dan Asas dalam Hubungan Terapeutik. Di dalam unsur Asas Keseimbangan akan terakumulasi di dalamnya pemahaman-pemahaman atas Pengertian Keseimbangan, Asas Pendukung asas Keseimbangan, dan Hubungan di antara Asas Keseimbangan dan Asas Pendukungnya yakni asas Kemanfaatan, asas kepastian hukum dan asas pengayoman.

Penulisan asas keseimbangan dengan ketiga asas pendukung yang dikaitkan satu dengan lainnya yang menggambarkan bahwa asas keseimbangan tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan asas-asas yang lainnya, sehingga merupakan suatu sistem asas hukum yang subsistemnya berkaitan satu dengan lainnya

Setelah mendapatkan dan dilakukan penulisan tentang kedua konsep hukum tersebut, maka dapat dilakukan analisis hubungan di antara unsur-unsur urgen tersebut secara kualitatif dengan memperhatikan hubungan sebab akibat. Dengan

cara demikian akan mendapatkan jawaban sementara berbentuk hipotesis kerja, berkaitan dengan ditentukannya secara hukum tentang perlindungan pasien yang dikaitkan dengan asas keseimbangan.

Setelah Pengantar singkat di atas, selanjutnya akan dituliskan di dalam Subbab B unsur-unsur dari Perlindungan Hukum Pasien, kemudian dilanjutkan dengan penulisan Subbab C yang berisikan tulisan tentang unsur-unsur dari Asas Keseimbangan, setelah itu di dalam Subbab D akan dituliskan analisis dari Unsur-unsur perlindungan hukum pasien dan unsur-unsur asas keseimbangan, setelah itu di dalam Subbab E sebagai Subbab Penutup berisi rangkuman dari seluruh penulisan Bab IV ini.

## **B. UNSUR-UNSUR PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN**

Perlindungan hukum pasien merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dari upaya pelayanan kesehatan, dengan demikian perlu dipahami pengertian kesehatan itu sendiri secara benar. Patut dipahami bahwa pengertian kesehatan secara universal harus selalu ditempatkan dalam sehat antara sehat jasmani dan sehat rohani. Secara lebih rinci sebagaimana diuraikan oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa keadaan sehat harus meliputi sehat secara fisik, mental, spiritual, dan sosial yang pada akhirnya memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Upaya kesehatan perorangan yang berarti mengandalkan selain dari Pemerintah juga mengandalkan sumber pendanaan dari masyarakat secara swadaya, harus terintegrasi dengan upaya kesehatan secara menyeluruh dan holistik. Berbicara upaya kesehatan perorangan selalu terdapat hubungan segitiga

antara orang sakit yang diberi nama pasien di satu sisi dengan tenaga kesehatan dan sarana kesehatan di sisi lain, dapat dikatakan merupakan suatu upaya yang memiliki pertanggungjawaban secara baik secara hukum maupun non hukum, di mana masing-masing bertanggung jawab secara penuh demi tercapainya derajat kesehatan yang optimal.

Perlindungan hukum terhadap pasien, sebagai pihak yang awam selalu dianggap lemah, menjadi suatu keniscayaan yang secara eksplisit ditentukan di dalam norma perundang-undangan, mengandung makna adanya kesadaran yang tinggi di antara pihak-pihak berkepentingan dalam menciptakan pembangunan kesehatan secara integral dan terpadu. Kemudian pemberlakuan norma kesehatan diikhtiarkan harus selalu berpedoman dan berpijak pada asas-asas yang telah ditentukan.

Sedangkan makna terpenting dari tujuan adalah selalu berkaitan erat dengan hasil yang hendak diraih. Suatu tujuan yang hendak diraih pada umumnya selalu dalam korelasi antara hasil yang diperoleh dan dampak positif sebagai kelanjutan dari hasil yang diperoleh. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, secara eksplisit mencantumkan pemberlakuan asas perikemanusiaan, asas keseimbangan, asas manfaat, asas perlindungan, asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban, asas keadilan, asas gender dan nondiskriminatif, dan asas norma agama.

Demikian urgen dan relevannya penggunaan asas-asas tersebut, sehingga interpretasinya pun perlu dilakukan secara otentik. Interpretasi otentik atas asas yang digunakan asas perikemanusiaan; asas keseimbangan; asas manfaat berarti bahwa pembangunan kesehatan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya

bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga Negara; asas perlindungan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan kesehatan; asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban berarti bahwa pembangunan kesehatan dengan menghormati hak dan kewajiban masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum

Berkaitan dengan tujuan kesehatan, maka Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, secara jelas menunjukkan adanya kesinambungan; tujuan dalam artian hasil, dinyatakan bahwa kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat agar terwujud derajat kesehatan yang tinggi. Selanjutnya tujuan dalam artian dampak dari hasil, dinyatakan bahwa kesehatan merupakan investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Oleh karena itu mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi, merupakan upaya yang berlangsung secara terus menerus dan berimbang, dan pada gilirannya dapat dijadikan sebagai investasi untuk dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomi.

Di dalam hukum selalu diajarkan adanya upaya menciptakan kedudukan yang sama di muka hukum, adanya timbal balik kedudukan antara hak dan kewajiban. Kedudukan timbal balik antara hak dan kewajiban diberlakukan terhadap siapa saja yang memiliki kepentingan hubungan hukum. Suatu kepentingan atau secara lebih konkrit disebut sebagai kebutuhan, dapat dipastikan selalu melekat pada diri setiap individu maupun masyarakat manusia. Oleh karena itu dimaksudkan kedudukan timbal balik antara hak dan kewajiban bidang kesehatan, mengandung makna adanya hak seseorang menjadi kewajiban pihak

lain dan sebaliknya dari semua yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan.

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah berupaya mengatur tentang hak dan kewajiban, khusus berkaitan dengan hak dan kewajiban secara individual. Norma yang mengatur tentang hak dan kewajiban keseluruhannya diawali dengan kata setiap orang. Sungguh tidak dapat dipungkiri bahwa antara hak dan kewajiban selalu terdapat hubungan timbal balik yang sangat erat, dimana entitas yang satu selalu mencerminkan adanya entitas yang lain. Namun demikian perlu pula diperhatikan bahwa dalam artian yang lebih luas, maka pemahaman terhadap hak dan kewajiban perlu pula dilakukan secara lebih terperinci berkaitan dengan bidang-bidang tertentu secara lebih spesifik.

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan secara jelas mengatur tentang Tanggung Jawab Pemerintah agar selalu membuat kebijakan yang serasi dan berimbang. Semua pihak yang terlibat di dalamnya harus diperlakukan dan ditempatkan secara berimbang, dan terbebas dari segala macam bentuk diskriminasi kebijakan. Tanggung Jawab Pemerintah dalam membuat kebijakan bidang kesehatan tercermin pada aspek merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi agar tercipta pemerataan dan terjangkau oleh sebanyak mungkin lapisan masyarakat. Secara lebih tegas dinyatakan bahwa tanggung jawab Pemerintah dikhususkan terhadap pelayanan publik, yang berarti berlaku untuk semua.

Oleh karena Tanggung Jawab Pemerintah dikhususkan pada pelayanan publik, maka secara lebih jauh Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan pengayoman terhadap kelompok yang lebih lemah atau kurang mampu. Makna

pelayanan publik akan selalu mengarah pada bentuk-bentuk jaminan terselenggaranya pelayanan terhadap semua warga negara. Kelompok lemah atau kaum terpinggirkan pada umumnya menjadi kelompok sasaran utama dalam pelayanan publik, dikarenakan pada umumnya di dalam kelompok ini secara struktural adalah lemah dari segala sisi. Kelompok ini pada umumnya lemah dari sisi kemampuan ekonomi, akses, maupun status sosial lainnya.

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur Tanggung Jawab Pemerintah dalam rentang persoalan yang sangat luas, diantaranya adalah tanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial, ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat, ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi, memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan, ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau.

Perlu diperhatikan bahwa pengertian pasien di Indonesia ternyata mengacu pada dua produk perundang-undangan atau hukum positif, yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran memberi pengertian bahwa pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit memberi pengertian bahwa Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi



masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.

Perbedaan pengertian pasien dengan mengacu pada kedua produk perundang-undangan tersebut, hanya terletak pada sisi pihak pemberi layanan kesehatan. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengartikan pasien sebagai setiap orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari dokter atau dokter gigi. Sedangkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit mengartikan pasien sebagai setiap orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari sarana kesehatan.

Sebagaimana pengertian pasien, hak dan kewajiban pasien diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Ketentuan tentang Hak Pasien yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran lebih pada gambaran hubungan antara subjek hukum orang dengan subjek hukum orang yang lebih bersifat khusus. Sedangkan ketentuan tentang Hak pasien dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit lebih menggambarkan adanya hubungan antara subjek hukum orang dengan subjek hukum badan hukum yang lebih bersifat umum.

Hak dan Kewajiban Dokter dan Dokter Gigi diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Hak dokter lebih kepada memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional, memperoleh informasi



yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya; dan menerima imbalan jasa.

Sedangkan kewajiban dokter atau dokter gigi antara lain: memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien, merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia, melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya, dan menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.

Dengan berpijak pada konsep perjanjian terapeutik yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak, maka dokter memiliki hak dan kewajiban sebagai pengemban profesi. Khusus berkaitan dengan kewajiban dokter, maka dokter wajib merawat pasiennya dengan cara keilmuan yang dimiliki secara adekuat. Dengan demikian yang dilakukan dokter merupakan upaya atau usaha sejauh mungkin sesuai dengan ilmu yang dimilikinya.

Hak dan Kewajiban Rumah Sakit terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Hak rumah sakit yang ditentukan di dalam peraturan hukum ini lebih kepada hak untuk mendapatkan perlindungan dan kenyamanan dalam melakukan penyelenggaraan rumah sakit yang bersifat khusus. Sedangkan kewajiban rumah sakit sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan yang secara timbal balik menjadi hak pasien sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan

lebih bersifat khusus yang memberikan perlindungan kepada pasien untuk mendapatkan haknya.

Rumah sakit dalam kedudukannya sebagai subyek hukum atau pemberi jasa pelayanan kesehatan perorangan memiliki tugas pelayanan dan penunjang medik sekaligus pada aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Dengan konsep demikian, maka ruang lingkup rumah sakit semakin luas meliputi pelayanan kesehatan perorangan maupun pelayanan kesehatan masyarakat. Hak dan kewajiban yang dimiliki Rumah Sakit berkaitan erat dengan hak dan kewajiban pasien yang diperoleh karena kewenangan secara atributif.

Perlindungan Hukum Pasien menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, secara umum mengatur tentang perlindungan dari hubungan antara subjek hukum pemberi jasa pelayanan kesehatan dengan subjek hukum penerima jasa pelayanan kesehatan.

Perlu diperhatikan adalah hal-hal yang berkaitan dengan hubungan antara dokter dan pasien yang tidak setara atau berimbang, dimana pasien berada pada posisi lebih lemah di hadapan dokter atau rumah sakit, dan karenanya perlu mendapat perlindungan hukum. Cara yang ditempuh untuk melindungi pasien dalam kondisi demikian adalah memberikan rambu-rambu hukum agar dokter tidak bertindak yang dapat merugikan pasien. Penciptaan rambu-rambu hukum tersebut antara lain berdasarkan pertimbangan aspek hati nurani dan moral, etika medis, disiplin profesi. Adanya norma perlindungan hukum terhadap pasien secara demikian dapat dikatakan sekaligus berdampak pada perlindungan hukum terhadap dokter. Perlindungan hukum terhadap pasien menjadi acuan dokter dalam melaksanakan tugas profesinya.

Salah satu jenis perlindungan hukum pasien adalah upaya diselenggarakannya dengan seksama tentang keselamatan pasien, bagian relevan dan urgen di dalam Permenkes Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien, yakni tentang Pengertian Keselamatan Pasien, Komite Nasional Keselamatan Pasien, dan Standar Keselamatan Pasien, dan Standar Hak Pasien.

Keselamatan Pasien adalah suatu sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman, meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Dengan demikian inti dari keselamatan pasien adalah menciptakan asuhan pasien lebih aman yang dilakukan dalam suatu sistem.

Perlu dijelaskan dalam kerangka sistem berarti adanya suatu tatanan yang menghubungkan berbagai kepentingan dalam suatu gerak bersama secara serasi, harmonis, terpadu, berimbang, dan berakhir dengan suatu capaian secara adil. Asuhan berdasarkan suatu sistem berarti adanya suatu masukan, proses, dan keluaran secara serasi, harmonis, terpadu, berimbang, dan berakhir dengan suatu hasil dan dampak secara adil.

Komite Nasional Keselamatan Pasien adalah organisasi fungsional di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, serta bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan. Keanggotaan Komite Nasional Keselamatan Pasien ditetapkan dengan Keputusan Menteri atas usulan Direktur Jenderal. Keanggotaan Komite Nasional Keselamatan Pasien terdiri dari unsur Kementerian Kesehatan,

kementerian/lembaga terkait, asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan, dan organisasi profesi terkait. Komite Nasional Keselamatan Pasien memiliki tugas memberikan masukan dan pertimbangan kepada Menteri dalam rangka penyusunan kebijakan nasional dan peraturan Keselamatan Pasien.

Penting untuk diperhatikan berkaitan dengan Komite Nasional Keselamatan Pasien adalah, bahwa untuk menciptakan kebijakan dan standar perlindungan pasien diperlukan suatu komite. Komite berarti adanya suatu kerjasama yang menghubungkan berbagai kepentingan dalam suatu gerak bersama secara serasi, harmonis, terpadu, berimbang secara proporsional, komite berarti adanya suatu pembagian tugas secara serasi, harmonis, terpadu, berimbang secara proporsional, komite berarti adanya suatu tujuan secara serasi, harmonis, terpadu, berimbang secara proporsional.

Berkaitan dengan keselamatan dan perlindungan hukum pasien yang dilakukan dengan melibatkan suatu komite, mengandung makna bahwa kebijakan dan standar penyelenggaraan yang dilakukan harus dapat akomodatif terhadap beragam kepentingan pengampu kepentingan penyelenggara pelayanan kesehatan. Kerjasama, pembagian tugas, dan tujuan dari beragam unsur yang terlibat di dalam komite sebagai representasi kepentingan harus merupakan suatu sinergi yang dapat dipertanggungjawabkan terutama diantara kepentingan pasien, rumah sakit, kedokteran, petugas kesehatan dan Pemerintah.

Standar Keselamatan Pasien dan Standar Hak Pasien berisi pengaturan tentang Standar Keselamatan Pasien dan Standar Hak Pasien. Standar Keselamatan Pasien antara lain: hak pasien, pendidikan bagi pasien dan keluarga, Keselamatan Pasien dalam kesinambungan pelayanan, penggunaan metode

peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan peningkatan Keselamatan Pasien, peran kepemimpinan dalam meningkatkan Keselamatan Pasien, pendidikan bagi staf tentang Keselamatan Pasien, dan komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai Keselamatan Pasien.

Sedangkan Standar Hak Pasien pada intinya merupakan hak pasien dan keluarganya untuk mendapatkan informasi tentang diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, prognosis terhadap tindakan yang dilakukan, dan perkiraan biaya pengobatan. Kriteria standar hak pasien meliputi bahwa harus ada dokter penanggung jawab pelayanan, rencana pelayanan dibuat oleh dokter penanggung jawab pelayanan, dan penjelasan secara jelas dan benar kepada pasien dan keluarganya dilakukan oleh dokter penanggung jawab pelayanan.

Hal penting untuk diperhatikan atas Standar Keselamatan Pasien dan Standar Hak Pasien adalah, bahwa untuk menciptakan perlindungan hukum pasien diperlukan suatu kesinambungan antara standar keselamatan pasien dan standar hak pasien. Berkaitan dengan pemaknaan Standar Keselamatan Pasien dan Standar Hak Pasien dimaksud, sekurangnya terdapat empat catatan yang harus diperhatikan, yaitu standar yang dibuat harus mencerminkan hak dan kewajiban pasien dan keluarga pasien secara proporsional; standar yang dibuat harus mencerminkan hak dan kewajiban dokter secara profesional; standar yang dibuat harus mencerminkan hak dan kewajiban rumah sakit secara profesional dan standar yang dibuat harus mencerminkan hak dan kewajiban petugas kesehatan secara profesional.

Perlindungan hukum pasien yang dilakukan dengan melibatkan suatu standar mengandung makna bahwa Standar Keselamatan Pasien dan Standar Hak Pasien harus akomodatif terhadap beragam kepentingan pengampu kepentingan penyelenggara pelayanan kesehatan. Standar yang dibuat merupakan masukan dari beragam representasi kepentingan, dan harus merupakan suatu sinergi yang dapat dipertanggungjawabkan terutama di antara kepentingan pasien, sarana kesehatan dan tenaga kesehatan.

### **C. UNSUR-UNSUR ASAS KESEIMBANGAN**

Asas atau prinsip secara umum dapat dipahami sebagai hukum dasar, dasar yang menjadi tumpuan berpikir dan berpendapat, atau dasar dari suatu cita-cita. Dengan demikian dimaksudkan dengan asas atau prinsip selalu mengarah pada pemaknaan sebagai pegangan atau pendirian. Dalam suatu asas selalu terdapat di dalamnya pengertian nilai. Suatu nilai tertentu selalu terkandung di dalam suatu asas tertentu. Persoalannya adalah memberikan penjelasan tentang nilai tidak selalu sederhana.

Di dalam konteks hukum, maka suatu asas yang di dalamnya selalu mengandung nilai tertentu, merupakan entitas yang harus diperjuangkan untuk diwujudkan. Asas sebagai entitas bersifat abstrak perlu diejawantahkan dalam suatu rumusan kaidah atau norma yang konkrit. Logika yang dapat ditangkap berdasarkan konstruksi demikian adalah, bahwa asas hukum akan dapat diwujudkan apabila dalam pembentukannya didasarkan pada tujuan baik yang tumbuh dan berkembang di dalam kesadaran masyarakat pendukungnya. Hukum harus berwujud sebagai suatu kumpulan kaidah, dan di dalam kaidah selalu

terkandung asas dan nilai tertentu, sehingga hukum yang telah berwujud perundang-undangan layak untuk dipatuhi dan dilaksanakan.

Berpijak pada pengertian asas yang selalu berkaitan dengan nilai, maka secara umum asas hukum dapat dimengerti sebagai suatu yang sangat mendasar dan bernilai sebagai pedoman dan pijakan terciptanya norma hukum. Suatu perundang-undangan yang dibuat tidak diperkenankan bertentangan dengan asas hukum yang menjadi pijakan kelahiran norma. Penerapan hukum dalam aktivitas sehari-hari harus berpedoman pada asas hukum. Salah satu definisi tentang asas hukum oleh ahli adalah asas hukum bukanlah norma-norma hukum konkrit tetapi adalah dasar pikiran umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku.

Asas hukum dimengerti sebagai suatu pikiran dasar, bersifat abstrak, dan bukan merupakan hukum konkret. Asas hukum selalu terdapat di dalam sistem hukum dan menjelma dalam hukum positif. Oleh karena itu di dalam hukum positif dapat ditelusuri dan ditemukan sifat dasar yang terdapat di dalamnya. Kita dapat memahami perbedaan antara norma hukum dan asas hukum. Bentuk norma hukum terdiri dari peraturan yang nyata sedangkan asas hukum merupakan dasar pemikiran yang bersifat umum dan abstrak. Konsep norma hukum merupakan penjabaran atas ide sedangkan asas hukum merupakan konsepsi dasar yang dijabarkan ke dalam norma hukum. Sanksi pelanggaran terhadap norma hukum berupa sanksi sedangkan asas hukum tidak memiliki sanksi.

Berdasarkan uraian tentang asas hukum, maka harus dipahami bahwa asas hukum bukanlah peraturan hukum, namun sekaligus harus disadari bahwa sangat mustahil dapat memahami hukum tanpa memahami asas hukum yang terdapat di dalamnya. Asas hukum selalu memberi makna moralitas terhadap kaidah hukum.



Asas hukum dapat berfungsi sebagai jembatan antara peraturan-peraturan hukum, cita-cita sosial, dan pandangan moral. Hukum dalam artian sekedar norma tanpa dijiwai oleh asas seolah berada dalam ruang hampa, sedangkan asas tanpa diungkapkan atau diwujudkan dalam kaidah atau norma hanya mengawang-awang.

Sekurangnya terdapat tiga faktor utama yang memerlukan perhatian dalam membangun hukum kesehatan dimanapun di dunia, termasuk dan terutama di Indonesia, yaitu faktor regulasi pemerintah, yurisdiksi sistem kesehatan, dan batas-batas tindakan medis. Oleh karena itu hubungan terapeutik dengan melibatkan para pengampu pelayanan kesehatan, agar memiliki nilai yuridis memerlukan pijakan asas dalam pembuatan norma bidang kesehatan. Beberapa asas tersebut adalah: Asas Konsensual: Asas yang akan menjadi pijakan dasar pemikiran perlunya ketegasan dan kejelasan dalam membuat parameter kesepakatan; Asas Itikad Baik: Asas yang akan menjadi pijakan dasar pemikiran perlunya ketegasan dan kejelasan dalam membuat parameter maksud baik; Asas Kebebasan: Asas yang akan menjadi pijakan dasar pemikiran perlunya ketegasan dan kejelasan dalam membuat parameter pilihan-pilihan; Asas Tidak Melanggar Hukum: Asas yang akan menjadi pijakan dasar pemikiran perlunya ketegasan dan kejelasan dalam membuat parameter tidak melakukan kejahatan; Asas Kepatutan dan Kebiasaan: Asas yang akan menjadi pijakan dasar pemikiran perlunya ketegasan dan kejelasan dalam membuat parameter hubungan kepercayaan.

Keseimbangan mengandung makna keadaan seimbang, sama berat atau sama kuat, setimpal, sebanding; keadaan yang terjadi apabila semua gaya dan

kecenderungan yang ada tepat diimbangi atau dinetralkan oleh gaya dan kecenderungan yang sama, tetapi berlawanan.

Perlu pula dipahami bahwa asas hukum ada yang memiliki karakter universal atau umum dan ada pula yang memiliki karakter partikular atau khusus. Asas hukum universal dapat diberlakukan terhadap semua bidang hukum, sedangkan asas hukum partikular hanya dapat diberlakukan dan dikembangkan di dalam bidang-bidang hukum tertentu saja. Oleh karena itu terdapat asas yang dapat ditemukan atau diberlakukan terhadap semua bidang hukum, namun terdapat pula asas yang secara spesifik hanya diberlakukan terhadap bidang hukum tertentu saja.

Asas keseimbangan dapat dikategorikan ke dalam asas bersifat universal dikarenakan banyak ditemukan atau dipergunakan sekaligus pada beragam bidang hukum. Asas keseimbangan berarti telah terjadinya keadaan kesepadan yang diharapkan oleh dua pihak dalam mengikat suatu perbuatan hukum, yang didasarkan atas kehendak dan keyakinan secara wajar dan layak dengan memperhatikan nilai etik, sosial dan hukum yang berlaku di masyarakat.

Pengertian asas keseimbangan dapat pula dikaitkan dengan mengaitkannya dengan komunal sebagai salah satu mentalitas hukum adat. Makna komunal mengandung makna bahwa di dalamnya terdapat unsur asas kewajaran, kebersamaan, asas persaudaraan, asas keserasian, asas harmonisasi, dan asas perlindungan yang keseluruhannya diarahkan guna menjaga dan jaminan terselenggaranya hak dan kewajiban secara wajar dan patut dalam tatanan komunal. Karakter universal asas keseimbangan terlihat pada perbedaan nuansa manakala asas keseimbangan diterapkan pada bidang-bidang hukum yang

berbeda. Terdapat titik berat pemaknaan menurut kepentingan yang berbeda. Asas Pendukung asas Keseimbangan

Asas Kemanfaatan di dalam hukum tidak dapat dilepaskan dari pemikiran mazhab utilitis. Pemikiran utilitis dikonstruksikan, bahwa suatu perbuatan dapat dinyatakan benar apabila dapat menciptakan kebahagiaan bagi mayoritas anggota masyarakat. Apabila suatu perbuatan ternyata menciptakan kesengsaraan bagi mayoritas anggota masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dinyatakan sebagai salah. Benar atau tidaknya suatu perbuatan manusia selalu berdasarkan kriteria kemanfaatan yang diterima oleh mayoritas anggota masyarakat.

Berkaitan dengan tujuan akhir hukum berupa keadilan, dapat dinyatakan bahwa keadilan akan sangat bergantung kepada seberapa jauh hukum dapat memberikan kebahagiaan terhadap mayoritas anggota masyarakat. Tugas hukum adalah menjadikan mayoritas anggota masyarakat mendapatkan kebahagiaan. Secara konkrit di dalam masyarakat harus tercipta jaminan perlindungan terhadap hak dan kewajiban terhadap masing-masing individu secara seimbang dan serasi. Untuk itu norma hukum yang diciptakan harus mampu memberi jaminan terciptanya keseimbangan-keseimbangan terhadap berbagai kepentingan.

Terdapat beberapa catatan penting dalam pengembangan konsep utilitis berkaitan dengan asas kemanfaatan, mengandung makna bahwa kesenangan dan kebahagiaan tidak dapat semata-mata diukur berdasarkan parameter kuantitatif. Sebab kualitas kesenangan dan kebahagiaan individu sangat beragam. Kesenangan dan kebahagiaan sokrates tentunya lebih bermutu daripada kesenangan dan kebahagiaan orang bodoh; dimaksudkan dengan kebahagiaan dan kesenangan adalah untuk semua orang yang terlibat dalam suatu kejadian.

Dengan demikian semua orang harus diperlakukan sama tanpa melihat perbedaan latar belakang status sosialnya. Kebahagiaan dan kesenangan satu orang tidak diperkenankan sebagai lebih penting di antara individu-individu yang ada.

Kemudian membedakan antara utilitarisme perbuatan dan utilitarisme aturan. Bahwa suatu kemanfaatan tidak selalu harus diterapkan pada perbuatan, tetapi dapat dilekatkan pada aturan moral yang mengatur suatu perbuatan.

Pemikiran Asas Kepastian Hukum berkaitan erat dengan madzab positivisme hukum dan madzab hukum murni. Madzab positivisme hukum berawal dari pemikiran legisme, yang mengidentikkan hukum dengan undang-undang. Legisme berpendirian tidak ada hukum selain undang-undang, tidak ada hukum diluar undang-undang, dan satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang.

Sedangkan pemikiran Madzab hukum murni mengacu pada konsep hukum murni dan konsep *stufenbau des recht*. Konsep hukum murni menyatakan, bahwa hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang tidak yuridis sebagaimana etika, sosiologi, politik dan sebagainya. Ajaran hukum murni semata-mata hanya memandang hukum sebagai keharusan yuridis dan tidak diperkenankan berbaaur dengan kenyataan sosial. Hukum harus dapat memberikan kepastian karena hukum memiliki kategori *das sollen* dan bukan *das sein*. Hukum harus ditaati karena sebagai kewajiban kehendak negara. Hukum adalah kaidah atau norma ketertiban yang mewajibkan orang taat sebagaimana seharusnya.

Berkaitan dengan konsep *stufenbau des recht* berarti hukum merupakan hirarkhi dari ketentuan hukum tertentu secara berjenjang. Suatu ketentuan hukum yang ada harus memiliki dasar berpijak dari ketentuan hukum yang lebih tinggi.

Norma dasar dan tertinggi dari keseluruhan hirarkhi disebut *grundnorm* yang bersifat hipotesis.

Madzab Positivisme Hukum dan Madzab Hukum Murni pada intinya hendak mengajarkan bahwa tata hukum atau hukum positif yang diterbitkan oleh otoritas negara adalah satu-satunya yang dapat memberikan kepastian hukum.

Asas pengayoman di dalam ilmu hukum berkaitan dengan paradigma ilmu hukum Indonesia. Paradigma ilmu hukum Indonesia dieksplisitkan agar secara sadar dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat pada penyelenggaraan hukum yang fungsional. Untuk sampai pada pemahaman asas pengayoman, maka terlebih dulu dipahami Cita Hukum Pancasila dan Konsepsi Hukum Pancasila.

Cita hukum bangsa Indonesia berakar di dalam Pancasila. Pandangan hidup Pancasila dirumuskan dalam kesatuan lima sila yang masing-masing mengungkapkan nilai fundamental dan sekaligus menjadi lima asas operasional kehidupan termasuk pengembangan hukum praktis. Berdasarkan konstruksi demikian, maka cita hukum Pancasila memiliki inti Ketuhanan Yang Maha Esa; Penghormatan atas martabat manusia; Wawasan Kebangsaan dan Wawasan Nusantara; Persamaan dan Kelayakan; Keadilan Sosial; Moral dan budi pekerti yang luhur; partisipasi dan transparansi dalam proses pengambilan putusan publik.

Konsepsi hukum Pancasila mengajarkan bahwa struktur keberadaan manusia adalah dalam kebersamaan dengan sesama manusia. Setelah memahami Cita Hukum Pancasila dan Konsep Hukum Pancasila, barulah dapat dipahami asas hukum pengayoman. Tujuan hukum berdasarkan cita hukum Pancasila adalah mewujudkan pengayoman bagi manusia. Ini berarti melindungi manusia secara pasif dengan jalan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan melindungi secara

aktif dengan jalan menciptakan kondisi yang manusiawi yang memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar dan adil untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh. Pelaksanaan pengayoman ini dilaksanakan dengan upaya-upaya mewujudkan ketertiban dan keteraturan yang memunculkan prediktabilitas; kedamaian dan ketenteraman; keadilan (distributif, komutatif, vindikatif, protektif); kesejahteraan dan keadilan sosial; pembinaan ahlak luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hubungan antara Asas Keseimbangan dan Asas Pendukung Asas Keseimbangan dapat dikatakan merupakan satu kesatuan untuk menciptakan pemahaman secara utuh dan berimbang. Asas Keseimbangan yang memiliki karakter universal memerlukan deskripsi yang mantap dari asas-asas berkarakter partikular sebagaimana asas kemanfaatan, asas kepastian, dan asas pengayoman.

Dengan pengaitan antara antara asas keseimbangan dan asas pendukung asas keseimbangan, maka representasi terhadap asas keseimbangan semakin memiliki pijakan kuat karena juga mendapat dukungan secara partikular. Demikian pula di dalam asas keseimbangan terdapat pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan asas kemanfaatan, asas kepastian, dan asas pengayoman.

#### **D. PELINDUNGAN HUKUM PASIEN DIKAITKAN DENGAN ASAS KESEIMBANGAN**

Kesehatan adalah kebutuhan pokok manusia selain sandang pangan dan papan, penyelenggaraan pelayanan kesehatan baik masyarakat maupun perorangan harus diselenggarakan dengan baik agar tercapai derajat kesehatan yang optimal. Hukum selalu berisi hak dan kewajiban, yang terbentuk dari dasar

hukum yang dikenal sebagai asas hukum dengan nilai-nilai hukum, harus ada kesetaraan antara hak dan kewajiban pihak yang satu dengan hak dan kewajiban pihak lain.

Asas hukum dalam pembentukan perundang-undangan kesehatan salah satunya adalah asas keseimbangan dengan pengertian adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban pihak satu dengan hak dan kewajiban pihak lain, yang tujuannya sesuai yang diatur di dalam hubungan pasien dengan sarana kesehatan dan tenaga kesehatan.

Suatu norma, kaidah, atau parameter yang di dalam hukum diterjemahkan dalam bentuk perundang-undangan, kelahirannya harus berdasarkan pertimbangan yang sangat matang dan harus merupakan representasi dari cita-cita atau kesadaran hukum dari masyarakat pendukungnya. Norma yang berarti sekaligus mengandung makna ukuran hal yang diwajibkan, hal yang dilarang, dan hal yang diperbolehkan, sangat bergantung pada pandangan hidup dari masyarakat pendukungnya.

Bentuk norma yang konkret dan sanksi yang tegas dapat dipaksakan, memang berbeda dengan asas yang berbentuk abstrak dan sanksi yang tidak dapat dipaksakan. Terlepas dari perdebatan yang terjadi antara kebenaran norma dan kebenaran asas sepanjang hidup manusia, namun yang patut untuk direnungkan bersama adalah bahwa pada kenyataannya masyarakat manusia dimanapun di dunia selalu mengartikan hukum sebagai perpaduan yang serasi dan seimbang antara norma dan asas. Manusia tidak dapat mendiskusikan dan menciptakan hukum tanpa kehadiran norma dan asas secara sekaligus. Perundang-undangan



apapun yang diciptakan secara otomatis terdapat didalamnya pertanggungjawaban norma dan asas.

Hal lain yang patut pula dipahami adalah, bahwa suatu perundang-undangan yang mengatur hal tertentu tidak selalu diharapkan bersifat sempurna. Oleh karena itu pemikiran secara sistemik di dalam hukum menjadi suatu yang tidak terhindarkan. Artinya, pemahaman terhadap suatu persoalan hukum terkadang memerlukan serba keterkaitan dari beberapa produk perundang-undangan agar mendapatkan konstruksi hukum yang memadai.

Kepentingan pengampu kepentingan yang berpayung pada undang-undang tertentu, dengan demikian harus selalu diselaraskan atau diseimbangkan dengan undang-undang lainnya agar perwujudkan hak dan kewajiban masing-masing dapat terselenggara secara berkeadilan sebagai tujuan akhir yakni tercapainya pemenuhan terhadap asas utama dan dukungan asas-asas lain. Pengaturan secara khusus tentang keselamatan pasien, menunjukkan adalah upaya perlindungan hukum pasien agar keselamatan pasien terlindungi sesuai dengan dasar asas keseimbangan yang didukung oleh asas kemanfaatan, asas kepastian hukum dan asas pengayoman.

Kehadiran asas atau prinsip yang memiliki karakter mutlak atau absolut ditengarai dapat mengatasi kelemahan norma hukum. Suatu asas yang kebenarannya selalu bersandar pada nilai atau tujuan baik, dapat dikatakan berkaitan erat dengan kebenaran suara hati atau nurani yang diajarkan selalu tidak bersedia diajak menyimpang atau berbohong. Nurani atau suara hati seseorang yang menjadi pijakan nilai, dan nilai menjadi pijakan suatu asas, telah menjadikan

suatu asas sebagai suatu entitas yang dianggap penting dalam menjaga martabat manusia sebagai makhluk berderajat tertinggi dalam pembuatan norma.

Berkaitan dengan Perlindungan hukum Pasien ternyata secara sistem selalu berkaitan dengan keberadaan Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Praktik Kedokteran, dan Undang-Undang Rumah Sakit yang sarat dengan pengaturan hak dan kewajiban pasien di satu sisi dengan tenaga kesehatan dan sarana kesehatan di sisi yang lain. Dengan demikian perlindungan hukum pasien secara normatif, selalu berkaitan erat dengan kepentingan pasien, kepentingan tenaga kesehatan, kepentingan sarana kesehatan, dan peran Pemerintah sebagai regulator dan pengawas semuanya sesuai dengan dasar pembentukan hukum di mana asas keseimbangan menjadi salah satu asas utama.

Perlindungan hukum pasien sangat tidak mungkin dilakukan tanpa keserasian dan keseimbangan terhadap beragam kepentingan dalam bidang pelayanan kesehatan. Penjabaran secara lebih teknis akan perlindungan pasien berdasarkan Permenkes tentang Keselamatan Pasien, pada dasarnya merupakan produk kebijakan level pemerintah dalam bentuk standar-standar tertentu, yang keseluruhannya berdasarkan asas keseimbangan di antara pengampu kepentingan bidang pelayanan kesehatan.

Di dalam Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Rumah Sakit dan Keputusan Menteri Kesehatan sebagai hukum positif dalam perlindungan pasien, dapat dipastikan keseluruhannya mengandung asas atau nilai baik implisit maupun eksplisit asas keseimbangan. Asas keseimbangan telah menjadi pijakan moralitas penciptaan norma sistem perlindungan hukum pasien. Dengan pemberlakuan norma sistem perundang-

undangan yang bertujuan memberikan pedoman terhadap perlindungan hukum pasien, maka asas keseimbangan memiliki signifikansi terhadap perlindungan hukum pasien dengan dukungan dari asas-asas pendukung yang tepat.

Berdasarkan analisis kualitatif di atas, dapat dirumuskan jawaban sementara berupa hipotesis kerja dari perumusan masalah penelitian: jika ditentukan tentang perlindungan hukum pasien, maka dipenuhinya asas keseimbangan.

## **E. PENUTUP**

Norma atau kaidah dalam rangka sistem perlindungan hukum pasien sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Rumah Sakit, dan Peraturan Menteri Kesehatan dipastikan terdapat di dalamnya tuntutan terciptanya keserasian dan jesetaraan di antara perlindungan hukum dari berbagai pihak penyelenggara kepentingan bidang pelayanan kesehatan perorangan.

Pelayanan kesehatan perorangan yang berbentuk hubungan segitiga antara orang sakit (pasien) di satu sisi dengan tenaga kesehatan dan sarana kesehatan di sisi yang lain, diatur dalam bentuk hak dan kewajiban para pihak dengan seksama dan setara, sehingga faktor utama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan yakni keselamatan pasien secara khusus telah diatur pula dalam bentuk peraturan hukum yang menyebabkan dipenuhi asas kepastian hukum, yang berdasarkan pula pada asas kemanfaatan dan asas pengayoman.

Asas atau prinsip keseimbangan memiliki urgensi dan relevansi diantara asas kemanfaatan hukum, asas kepastian hukum, dan asas pengayoman sebagai typically hukum Indonesia. Dengan demikian di dalam asas keseimbangan

terdapat di dalamnya daya dukung dari asas kemanfaatan hukum, asas kepastian hukum, dan asas pengayoman. Demikian pula di dalam asas kemanfaatan hukum, asas kepastian hukum, dan asas pengayoman, telah terjalin suatu kelindan yang kokoh dalam memberikan pijakan yang kuat dalam proses pembentukan norma.

Hubungan antara norma perundang-undangan yang secara sistemik bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum pasien dengan ditetapkan norma norma keselamatan pasien dan asas keseimbangan sebagai asas berkarakter universal dengan daya dukung beberapa asas partikular, adalah bahwa asas keseimbangan telah secara nyata menjadi pijakan yang kokoh dalam upaya perlindungan pasien. Norma dan asas yang terdapat di dalam sistem perundang-undangan dalam rangka perlindungan pasien, maka dalam konteks cita hukum Indonesia telah memberikan pengayoman terhadap semua pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Berdasarkan analisis kualitatif di atas, dapat dirumuskan jawaban sementara berupa hipotesis kerja dari perumusan masalah penelitian: jika ditentukan tentang perlindungan hukum pasien, maka dipenuhinya asas keseimbangan.